

KETAHANAN NASIONAL DAN MILENIUM KETIGA

T. Jacob*)

Ketahanan nasional, yang begitu ditonjolkan dan digembar-gemborkan hampir dalam setiap pidato pejabat, ternyata sangat lemah dan rapuh. Banyak uang, waktu, dan usaha telah dicurahkan untuk mencipta dan meningkatkan ketahanan nasional ternyata tidak efisien, bahkan hampir tidak ada gunanya. Pikiran dan tulisan telah banyak dihasilkan, tetapi implementasinya mengalami hambatan atau kegagalan. Ini sebenarnya adalah kekhasan Orde Baru: banjir retorika, tetapi kemarau pelaksanaan. Ini sesuai dengan salah-sebut istilah auctor intellectualis menjadi actor intellectualis. Auctor intellectualis adalah athor gagasan, otak di belakang tangan, sedangkan tangannya adalah aktor di lapangan, actor practicalis. Actor intellectualis adalah istilah rancu, otak yang memanipulasi, pikiran yang bekerja fisik, sehingga tidak ada yang benar-benar berhasil. Otak berkerah biru, sedangkan tangan berkerah putih.

Memang diketahui, seraya sering dilupakan, bahwa ketahanan nasional bersegi banyak. Dalam kerangka *security approach*, yang biasa dibayangkan adalah ketahanan militer dan politik, padahal *security* juga bersegi banyak. Meskipun akronim "hankampoleksosbud" kerap kali diucapkan, orang sering lupa pada ketahanan ekologis, ketahanan pendidikan, ketahanan demografis evolusioner dan ketahanan moral. Ketahanan hukum

dan agama pun hanya menduduki baris ketiga. Dari kelemahan-kelemahan inilah sebenarnya berpuncak segala krisis atau krisis multifaset yang kita alami sejak dua tahun yang lalu dan masih belum tampak akhirnya. Hidup seseorang atau suatu bangsa bukanlah sekadar politik dan militer, tetapi utuh meliputi berbagai bidang, yang untuk mudah memahaminya, telah dipilah-pilah.

*) Prof. Dr. T. Jacob, M.S., M.D., D.Sc., Guru Besar Fakultas Kedokteran UGM, Kepala Laboratorium Bioantropologi dan Paleoantropologi Fakultas Kedokteran Universitas Gadjah Mada Yogyakarta

Ketahanan Militer

Kalau kita telaah satu per satu, maka ketahanan militer juga rapuh. Acap kali dibayangkan oleh luar negeri dan oleh diri kita sendiri, bahwa ABRI adalah organisasi yang paling baik dan paling berdisiplin. Tetapi disiplin ini hanya tampak dan bekerja dalam baris-berbaris dan berseragam. Di luar itu tingkat disiplin sama saja dengan disiplin masyarakat. Malahan mungkin disiplin masyarakat lebih baik, karena dalam batas tertentu orang dapat membantah atau memperlihatkan ketidakpatuhan sipil, sedangkan dalam ABRI garis komando jelas dan tegas. Tidak mengherankan, kalau seorang perwira yang disertai tugas sipil, untuk menjaga disiplin yang pertama-tama dilakukannya adalah memberi seragam dan melatih baris-berbaris.

Kesulitan organisatoris yang lain adalah komandan bebas dari tanggung jawab kesalahan anak buahnya. Yang bersalah hanya dianggap oknum-oknum, padahal banyak penyimpangan bersifat sistemis. Misalnya pungutan liar tertentu bersistem dengan upeti ke atas, kebocoran atau pembagian ke samping, dan tesian ke bawah.

Dipersatukannya polisi dengan militer juga merupakan perkawinan yang inkompatibel.

Tugas polisi menjaga keamanan dalam negeri dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, dan pengusutan kejahatan menjadi terbengkalai, dan tersubordinasi pada ABRI *in sensu stricto* (dalam arti sempit) dan sering terkalahkan. Polisi tidak berdaya kalau salah satu angkatan, melakukan penyelundupan, melindungi perjudian atau perganjaan, penganiayaan, pengawasan senjata api, pemanfaatan preman, pelanggaran lalu-lintas dan sebagainya. Solidaritas ke-ABRI-an lebih tinggi daripada hormat terhadap hukum dan keadilan, semangat korpus (*corpsgeist, l'esprit de corps*) lebih dihargai daripada perikemanusiaan dan moral. Solidaritas tercermin pula pada pertukaran bintang kehormatan antara angkatan secara berkala.

Salah satu yang sangat mengganggu lagi adalah dwifungsi ABRI, yaitu peranan militer dan pertahanan serta peranan politik dan sosial. Sebetulnya ABRI selama ini melakukan trifungsi, ditambah dengan peranan ekonomi. ABRI mempunyai kepentingan ekonomis, perdagangan, finansial dan moneter yang berada di luar pengawasan Departemen-departemen di bawah Menko Ekuin, BPK dan DPR.

Secara teritorial kepentingannya berada di pulau-pulau basah atau setengah basah, seperti Su-

matera, Kalimantan, Jawa, Bali, Irian dan Timor Timur.

Secara sektoral ia meliputi gas dan minyak bumi, kehutanan, perkebunan, pengangkutan, industri, perbankan, pengamanan, Deplugri, dan lain-lain.

Menurut tolok internasional jumlah jenderal kita sangat tinggi, mutasi (horizontal dan vertikal) dan pensiun terlalu cepat, sehingga harus dicarikan kedudukan sipil untuk menampung mereka (bupati, gubernur, anggota DPR, dirjen, irjen, sekjen, menteri, duta besar, konsul jenderal, komisar bank dan perusahaan negara). Harus diakui ada suatu persentasi yang memang berbakat menduduki pekerjaan-pekerjaan itu, tetapi dalam hal-hal lain menjadi sebab tidak berjalannya dengan baik pemerintahan dalam negeri, diplomasi, perusahaan dan kehidupan sipil, yang akhirnya mengantarkan bangsa ke krisis politik, ekonomi, moneter dan ekologis.

Kita kuatir dengan peranannya yang meningkat dalam politik dan ekonomi, tugas militer dan pertahanannya menderita. Waktu untuk mempelajari persenjataan modern makin sedikit, demikian pula teknik intelijens. Pelatihan intelijens di Amerika Serikat terlalu diarahkan pada perlawanan terhadap terorisme, terutama "fundamentalis Islam" dan "radikal kota". Pejabat-peja-

bat militer tidak jarang menyatakan, bahwa ABRI jangan hanya dipakai waktu perjuangan melawan musuh, tetapi waktu kenduri tidak diajak ikut serta. Tetapi semua pihak dapat berkata demikian dalam masyarakat modern dengan pembagian kerja yang sudah lanjut. Dokter dapat berkata, waktu wabah dan sakit terminal, baru mereka dibutuhkan, tetapi dalam keadaan sehat dan senang acap dilupakan. Demikian pula guru, petani, pengacara, insinyur dan lain-lain.

Sebaliknya rakyat mengeluh, kalau ada konfrontasi atau kerusuhan, dikatakan keamanan dan pembelaan tanah air bukan urusan ABRI saja dan rakyat didaftar sebagai sukarelawan, satpam swakarsa, wanra, ratih dan sebagainya. Tetapi kalau sudah aman, ABRI bekerja di posisi sipil. Oleh karena itu perlu ada pengaturan lebih teliti dalam pembagian kerja di masa depan. Apakah cukup hanya ada sejumlah kecil tentara tetap, yang dalam keadaan darurat atau perang dibantu milisi yang sudah terlatih dengan sistem senjata modern, atau kita mempunyai tentara profesional yang tidak bekerja di bidang sipil selama dalam dinas aktif.

Usaha dagang sebaiknya dihapus sama sekali dari dunia militer, pejabat pemerintah dan pegawai negeri.

Ketahanan Politik

Ketahanan politik juga rapuh, meskipun jumlah partai politik direduksi menjadi tiga, yaitu 2 partai politik pendamping, yang bukan partai pemerintah dan bukan pula partai oposisi, sedangkan pemerintah didukung oleh golongan politik (Golkar) "majoritas tunggal" dan ABRI. KORPRI menjadi motor Golkar, tetapi tidak mendapat jatah kursi DPR/MPR. Pemegang kekuasaan adalah ketua Dewan Pembina Golkar, yang lebih suprema daripada hukum.

Ketahanan politik dalam sistem demikian sangat rentan terhadap nepotisma dan koneksi extraorganisatoris, dan ini telah dibuktikan secara dramatis dan tragis. Setahun sesudah sistem autoritarian itu tumbang, akar-akarnya masih kukuh dan mungkin akan bertunas kembali. Membasmi akar-akarnya (radikal) bukanlah kebiasaan mayoritas bangsa Indonesia. Kita lebih suka berserah diri pada Tuhan, daripada mengambil tindakan pemulihan sendiri.

Melihat perilaku partai-partai baru yang kecil-kecil sekarang, kita tidak yakin bahwa suasana multipartai di zaman demokrasi parlementer tidak akan terulang. Sangat memilukan, kalau sesudah pemilu nanti, instabilitas politik tahun 1950an akan teru-

lang. Yang sangat dibutuhkan adalah kematangan politik pemimpin-pemimpin partai yang menang nanti (partai pemerintah dan oposisi dengan pluralitas suara). Sehubungan dengan ini politik keseimbangan daerah perlu mendapat perhatian. Dalam Orde Baru orang menyangka dengan melarang membicarakan daerah dan suku, masalah itu dengan sendirinya lenyap. Pemimpin-pemimpin nasional harus merasa dirinya orang Indonesia, bukan orang dari kecamatan, kabupaten atau propinsi tertentu.

Ketahanan Ekonomi

Ketahanan ekonomis sangat rapuh. Memang banyak hal yang telah dibangun, tetapi dibandingkan dengan hutang yang dibuat, hasilnya seharusnya lebih banyak lagi. Faktor-faktor fundamental yang dianggap kuat, ternyata berdiri di atas gelembung-gelembung yang mudah ditusuk hingga Kempis. Malaysia mungkin lebih siap menghadapi globalisma pasar kapitalistis model Amerika, tetapi Indonesia yang kurang siap yang malah lebih berhasrat untuk segera berlakunya perdagangan bebas, arus bebas barang dan tenaga, uang dan informasi.

Kesadaran uang dan disiplin uang masih sangat rendah, seperti juga kesadaran dan disiplin

waktu. Waktu adalah uang, dan uang serta pengetahuan adalah kekuasaan. Kita kaya sumber daya alam, tetapi masih miskin ilmu dan teknologi, sehingga mudah dikacaukan oleh perusahaan transnasional dan spekulator, pialang dan manager dana.

Pendidikan kita masih mengejar kuantitas, belum diimbangi kualitas, dan paten yang kita pegang sangat sedikit. Dalam dunia kapitalistis dengan diversitas yang tinggi, kita belum menemukan sistem ekonomi yang cocok untuk kesejahteraan bangsa kita.

Ketahanan Kultural

Ketahanan kultural ternyata juga mudah hancur, karena pluralisma budaya dalam negeri dan kontak budaya yang makin intens dengan dunia Barat, terutama budaya elektronik yang menguniformisasi dunia. Kebudayaan Indonesia sedang terbentuk dari hasil interaksi budaya etnis yang banyak. Diharapkan dari berbagai subkultur timbul multikulturalisma dengan warna Indonesia, meskipun terdapat juga perbedaan vertikal di samping perbedaan horizontal dalam evolusi mosaik budaya di Nusantara.

Perbedaan-perbedaan yang ada menimbulkan ketegangan, ditambah pula oleh budaya pop yang masuk, yang lebih banyak

dan lebih mudah diserap daripada yang tinggi dan bermutu. Dalam krisis, benturan (*clash*) budaya mudah sekali terjadi dan tak dapat diselesaikan secara militer politis.

Ketahanan Ekologis

Ketahanan ekologis tidak pernah masuk pertimbangan ketahanan nasional, padahal ini berpengaruh terhadap generasi-generasi yang akan datang. Hiperexploitasi hutan, pelenyapan lahan subur untuk keperluan sistem industri-urban telah menimbulkan berbagai kesulitan di Danau Toba, Kalimantan, Bali, Irian, dan cagar alam serta terumbu karang di berbagai pulau.

Pengaruh cuaca di Pasifik dengan El Nino dan La Nina, yang masih belum dipahami benar, banyak sekali mengakibatkan persoalan, juga bagi Indonesia dan penduduknya di beberapa tempat.

Perubahan cuaca global di masa depan dapat diperparah oleh tindakan-tindakan ekonomis murni (*pure business*, kata orang dengan bangga) yang kurang ramah terhadap lingkungan. Perusakan bangsa (*mangrove*), pemilikan pribadi atas pantai (yang di Eropa sejak tahun 1970an dilarang), penghancuran biodiversitas, penangkapan ikan berlebihan (*overfishing*), pemakaian-lebih

tanah dan air untuk lapangan golf, pencemaran sungai dan laut, pembuangan limbah pabrik dan tambang, semuanya menurunkan ketahanan ekologis.

Ketahanan ini berdiri diatas segitiga pembangunan yang terlanjutkan, pelestarian lingkungan serta keadilan.

Ketahanan Pendidikan

Ketahanan pendidikan terganggu oleh orientasi pendidikan ke penciptaan sumber daya manusia (SDM). Kita ketahui bahwa konsep SDM melihat manusia sebagai salah satu faktor produksi, padahal pendidikan sejati meletakkan martabat manusia lebih tinggi dari itu. Konsep ini melihat pengusaha, penodal dan *the haves* sebagai puncak piramid sosial ekonomis dengan di tengah dan di bawah diisi oleh SDM dalam sistem perbudakan modern. Birokrat dan politikus, militer dan polisi, teknokrat dan pekerja otak hanya instrumen-instrumen dalam pengelolaan. Semuanya diarahkan ke efisiensi produksi, laba lebih besar, dan dapat diganti-ganti bila perlu, seperti juga alat-alat produksi yang lain.

Pengabaian harkat manusia ini menurunkan ketahanan nasional, yang pada hakekatnya tidak ditentukan oleh alat, perkasas, senjata, barang dan mesin.

Ketahanan Demografi

Ketahanan demografi dan evolusioner hanya diperhatikan dari satu arah, yaitu penguangan penduduk secara merata. Tidak diperhatikan angka kelahiran dan kematian di suatu daerah, tetapi dilakukan dengan *flat rate* seperti menabur kukuran (parutan) kelapa. Ini hanya demi mudahnya saja, karena kemalasan intelektual dan tak adanya perhatian pada *detail*. Pada mulanya *coercion* yang dilakukan melanggar hak-hak manusia, demi laporan yang baik untuk penyumbang dan penghutang dana. Pernah dana terlalu besar untuk dapat diserap secara wajar, sehingga terjadilah hal-hal yang gampang diduga.

Kurang dipikirkan bahwa pada abad dengan perubahan-perubahan iklim yang drastis dan tak teramalkan serta munculnya *nedis* (*new emergent diseases*) karena terganggunya keseimbangan ekologis dan demografis, sepertiga penduduk dunia dapat lenyap, bahkan ada yang memperhitungkan penduduk dunia akan merosot deras dari 6 biliun menjadi 3 biliun pada pertengahan abad depan.

Ketahanan demografi memerlukan pula keadilan distributif, penyediaan lapangan kerja, pendidikan yang direformasi dan perhatian terhadap konsumsi

dalam negeri, tidak hanya tertuju ke ekspor.

Ketahanan Moral

Ketahanan moral sangat lemah dan kerap kali dilecehkan dengan tuduhan moralisasi (*moralizing*) berlebihan. Padahal majunya suatu bangsa tergantung terutama pada ambang moralitasnya. Kehancuran suatu negara hampir selalu didahului oleh kehancuran moral dan etik. Pancasila sendiri berdiri masing-masing atas moralitas. Kerusakan sosial, kebangkrutan perbankan, pudarnya kredibilitas pemimpin dan pemerintah, korupsi, kehancuran lingkungan, semuanya berpunca dari pembusukan moral.

Usaha-usaha pemulihan dilakukan secara tambal sulam, yang tidak ada artinya selama inti persoalan tidak disentuh. Kita hanya mengais-ngais permukaan sekedar untuk melupakan rasa sakit dan menutup mata terhadap jurang di depan kita.

Usaha pendidikan tidak berhasil mencegah meluncurnya masyarakat menuruni lereng licin, karena "suasana kelas" dan suasana masyarakat jauh berbeda. Anggaran pendidikan seolah-olah sengaja direndahkan, agar keadaan immoral yang menguntungkan berlangsung lebih lama.

Ketahanan Hukum

Ketahanan hukum merosot tajam dan membuat sistem peradilan kita berupa karikatur. Tiap-tiap mata rantai penegakan hukum terkontaminasi oleh irregularitas. Pencari keadilan, yang makin banyak, kehilangan institusi tempat berpaling, dan tiada pegangan lagi yang dapat diandalkan. Penjahat lebih terlindungi daripada korban. Konstitusi dan supremasi hukum, hak-hak manusia dan etika hanya didegunkan kalau diri sendiri yang menjadi korban. Berbagai proses hukum terhenti tanpa alasan di tengah jalan. Tidak jelas berapa banyak yang tidak bersalah dihukum dan yang bersalah bebas. Yang nyata-nyata bersalah seperti aktor tawuran, pelempar bus dan keretaapi, stasion dan stadion, rumah penduduk dan kantor partai, diampuni dengan sangat permisif, bahkan ditolong (diberi nasi, ongkos angkutan, seragam). Sebaliknya yang berpawai damai dengan izin malah dikejar, dipenung, diseret dan ditendang; yang tidak bersalah dipenjarakan, dan yang bersalah ditolong melarikan diri.

Panorama hukum tampak mendung berawan tebal hitam. Tetapi banyak pelaku-pelaku peradilan sudah kebal terhadap ketidak-adilan. Ketahanan hukum sangat menderita.

Ketahanan Agama

Ketahanan agama, pelampung terakhir, sangat memilukan dan memalukan. Apalagi yang dapat diharap kalau dalam administrasi agama pun ada pungutan liar? Naik haji, zakat, pendirian mesjid, upacara peringatan agama, perkawinan dan kematian dijadikan sumber penghasilan. Ritus dan pengajaran agama makin semarak, tetapi seperti juga dalam P4, kulit lebih dipentingkan daripada isi. Kerusuhan berbau agama terjadi di mana-mana, pembakaran, penodaan dan perusakan rumah ibadat, pembunuhan agamawan, politisasi dan ekonomisasi agama, semuanya sangat mencemaskan.

Yang aneh lagi adalah orang-orang, yang sekian lama melakukan kesalahan besar dan tersistematisasi, tidak merasa berdosa serta menyangka masih dihormati rakyat dan diridai Tuhan. Rasa bersalah, rasa malu, rasa berdosa tidak ada lagi.

Melemahnya semua aspek ketahanan nasional menimbulkan banyak derita (*dukkha*) pada masyarakat sebagai individu, keluarga maupun kelompok politis, agama atau etnis. Reformasi total, tidak hanya "reformasi pembangunan", baru dianggap berhasil, kalau ketahanan nasional dengan sungguh-sungguh

ditingkatkan, tidak secara terpisah, tetapi terjalin dalam ketuhanan kehidupan. Dengan demikian derita yang ditimpakan kepada rakyat sekurang-kurangnya dapat direduksi, kalau tidak dihilangkan sama sekali.

Menuju Milenium III

Abad XXI dan Milenium III akan membawa bermacam-macam hal, sebagian daripadanya tak pernah diprediksi. Peristiwa-peristiwa yang akan datang menyangkut demografi, ekologi, politik, militer, ekonomi, budaya dan pendidikan.

Demografis penduduk Indonesia akan menjadi 280 juta, jadi sebesar Amerika Serikat sekarang, tetapi dari no. 4 menjadi no. 6 terbesar, karena didesak oleh Nigeria, Pakistan atau Bangladesh.

Dengan autonomi luas bagi semua propinsi, maka pusat-pusat pertumbuhan akan bertambah di luar Jawa, dan program transmigrasi tidak perlu lagi. Dari sudut ini ketahanan nasional akan meningkat. Akan tetapi dapat terjadi wabah virus baru dan perubahan iklim yang besar, hingga merusak panen dan menimbulkan kelaparan.

Dualitas ekonomi untuk ketahanan golongan yang lemah dan rentan merupakan keharusan. Bahan bakar baru akan ditemukan yang mengalahkan bahan

bakar fosil dan nuklear. Selain daripada itu harus tetap dijaga kecukupan bahan makanan untuk keperluan sendiri, dan kepentingan lahan pertanian pangan pokok tidak terkalahkan oleh perkebunan monokultur untuk ekspor. Rakyat harus bersaing makanan dengan hewan-hewan negeri maju, dan ketahanan pangan sangat penting bagi sesuatu negara. Ketahanan ekologis akan makin mendesak pada abad depan, karena perubahan-perubahan ekosistem dan cuaca dapat tiba-tiba mengejutkan kita dari keterlenaan. Migrasi global terus terjadi, karena kelaparan, pengangguran, kerusuhan politik dan perang.

Mutasi tatadunia akan terjadi pada awal milenium depan dengan pusat-pusat konflik yang lama dan baru. Budaya terorisma akan menjalar, dan menempatkan pemerintah-pemerintah dalam situasi yang sukar. Senjata teroris makin beraneka dan berbahaya, serta tujuan mereka juga bermacam-macam.

Kita harus siap dengan situasi konflik tingkat rendah yang permanen, yang ditimbulkan oleh aspirasi-aspirasi etnonasionalisma sebagai reaksi terhadap globalisma, dan kesenjangan ekonomi yang meluas di Dunia Keempat.

Kekuasaan politik-militer-ekonomis akan berpusat banyak (multinuklear), dengan kekuatan

pentanuklear yang dominan (Amerika Serikat, Uni Eropa, Cina, Jepang dan Rusia). Tetapi globalisma kapitalistis versi Amerika tampaknya tidak akan berhasil, oleh karena peranan negara Dunia Ketiga dan Keempat yang antitetis, dibantu oleh Dunia Kedua dalam hal-hal tertentu.

Harus diingat bahwa kehidupan tidak berlangsung linear, tetapi banyak sekali variabel yang mempengaruhinya, sehingga ia lebih bersifat retikular. Benturan mata uang dapat menurunkan ketahanan nasional, diperkuat oleh spekulasi derivat uang dan komoditas virtual.

Meskipun demikian, negara besar tetap bersiap-siap dengan persenjataan abad XXI. Korban rakyat yang terbanyak masih disebabkan oleh pemerintah-pemerintah, bukan oleh teroris. Benturan peradaban tidak akan terjadi secara global, tetapi lebih bersifat pasca-Clausewitz, dan bukan sebagai kelanjutan atau substitut diplomasi. Dunia akan menyaksikan merosotnya kekuasaan Amerika; ia tak dapat bertindak sendiri dan sesuka hati terhadap negara kecilpun, apalagi terhadap perusahaan-perusahaan transnasional.

Pendidikan memegang kunci induk menuju kemajuan atau kemunduran pada abad depan. Selama ini pendidikan dianggap

tidak penting, kecuali sebagai bunga bibir saja. Sertifikasi APEC dan mungkin WTO akan menentukan arus ahli dan teknologi kelak. Universitas, rumah sakit, penerbit, toko buku dan surat kabar asing akan masuk tak terbandung, sedangkan arus sebaliknya ke luar negeri dapat dikatakan nihil.

Berbagai aspek kebudayaan dan agama kita akan mendapat pengaruh: ideologi, filsafat, sekularisma, seni, musik, film, TV, makanan, pakaian, gaya hidup dan sebagainya. Perkawinan campuran bertambah banyak dan sering, baik interetnis, interrasial, interreligios, maupun heterogami sosial ekonomis. Secara nasional kebudayaan kita mengalami homogenisasi, tetapi secara internasional terjadi heterogenisasi.

Di dalam negeri perbedaan antara etni berkurang, tetapi diversitas provinsial meningkat. Secara global kita lihat ada homogenisasi, tetapi di sebuah negara diversitas bertambah. Bagaimana Indonesia berperan

dalam hal ini sangat penting dalam ketahanan nasionalnya.

Informasi tak terhalang oleh batas-batas negara; ia hanya terhalang oleh keadaan sosial ekonomi dan tingkat pendidikan. Tidak benar bahwa ada kebebasan dan objektivitas media massa di dunia. "Pengelolaan" informasi tetap terjadi di negara yang paling liberal pun. Informasi tentang negara kita akan lebih banyak diketahui oleh negara lain daripada kita sendiri. Ini dapat merugikan kita dari sudut ketahanan dan ekonomi, karena informasi makin mahal, banyak dan beragam.

Akhir kalam, kalau kita benar-benar ingin memperbaiki ketahanan nasional kita yang remuk sekarang, kita harus berpikir dan bekerja keras dan sungguh-sungguh untuk memeliharanya pada milenium ketiga Tarikh Umum (*Common Era*), dibawah pimpinan pemuka-pemuka bangsa yang jujur, peka dan waspada terhadap perubahan, serta berani menghadapi negeri luar dan memperjuangkan nasib rakyat.